

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Dilaksanakan Dua Tahap, Renovasi 1.162 Rumah Tak Layak Huni di Kota Semarang Tahun Ini

<http://jateng.tribunnews.com/2019/02/12/dilaksanakan-dua-tahap-renovasi-1162-rumah-tak-layak-huni-di-kota-semarang-tahun-ini>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membantu kebutuhan pembangunan atau renovasi 1.162 rumah tidak layak huni (RTLH).

Menurut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pembangunan RTLH itu dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama dikerjakan paling lambat April 2019 dan tahap kedua setelahnya.

"Tahap pertama kami bangun 500 rumah dan harus selesai sebelum April 2019. Setelah itu dilanjut sisanya," terang Hendi, sapaan Hendrar Prihadi, usai launching program RTLH di Rt 01 Rw 11 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, ada beberapa evaluasi terkait program RTLH ini.

Evaluasi pertama, program RTLH harus tepat sasaran atau khusus untuk masyarakat kategori menengah ke bawah.

"Jangan yang rumahnya cukup bagus dan orangnya kategori mampu, tapi dapat program ini. Ini keliru. Program ini untuk masyarakat yang rumahnya tidak nyaman dan tidak sehat. Dari sisi penghasilan mereka masih berkategori rendah," tandasnya.

Selanjutnya, kata Hendi, koordinasi dan komunikasi antara penggarap dan pemilik rumah sangat diperlukan dalam program ini agar rumah yang dibangun nantinya sesuai harapan bersama.

"Kadang-kadang rumah dikasih RTLH malah geger. Tidak sesuai harapan. Inginnya direhab semua tapi ternyata cuma sebagian. Tadinya rumahnya cukup lumayan bagus direhab malah tidak nyaman. Saya rasa komunikasi yang harus dipecahkan di awal," ujar Hendi.

Kali ini, Semarang >Pemkot Semarang menggandeng Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam melaksanakan program RTLH ini.

Menurutnya, menggandeng Gapensi, tolak ukur upaya perbaikan RTLH di Kota Semarang yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) akan lebih baik.

Adapun sasaran pembangunan RTLH ini yaitu menyeluruh di wilayah-wilayah Kota Semarang seperti Kecamatan Pedurungan, Gayamsari, Mijen, dan lainnya.

"Saya minta pengerjaannya tidak terlalu dipisah-pisah. Misalnya Gapensi mengerjakan satu atau dua kecamatan cukup. Kalau dipisah-pisah mobilisasi menjadi susah," ujarnya.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali menuturkan, mengacu data layak masuk program RTLH pada 2011 sekitar 13 ribu rumah.

Sedangkan pada realisasi pelaksanaan 2011 hingga 2019, baru sekitar 5 ribu rumah.

"Jadi masih sekitar 8 ribu rumah yang harus didanai Semarang >Pemkot Semarang. Karena keterbatasan dana untuk merealisasikannya, kami juga berusaha mencari dana dari provinsi maupun pusat," ungkap Ali.

Pada tahun ini, sebanyak 1 ribu rumah dibangun menggunakan dana APBD.

Sedangkan 162 rumah menggunakan APBN.

Adapun total anggaran yang digunakan untuk program RTLH tahun ini Rp 16 miliar baik dari APBD maupun APBN.

Dijelaskan Ali, 1 unit rumah senilai Rp 15 juta melalui APBD Kota Semarang.

Rincinya, Rp 12,5 juta pembelian material dan Rp 2,5 juta upah tenaga.

Sedangkan yang menggunakan dana APBN, Rp 17 juta per unit.

Rp 15 juta pembelian material dan Rp 2,5 juta upah tenaga.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, kebutuhan material dilakukan melalui Disperkim Kota Semarang.

Sedangkan anggaran upah tenaga dapat diambil masyarakat melalui sistem perjanjian.

"Jangan material sudah dibelikan, masyarakat malah tidak mengerjakan. Seandainya ada seperti itu, kami ada tim pengawas dari dinas untuk mengawasi pembangunan RTLH sehingga segera dikerjakan," terangnya. (Eka Yulianti Fajlin)